



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Majalah *Tempo* edisi 16 September 2019 sempat menuai kontroversi di masyarakat. Di edisi tersebut, majalah *Tempo* memakai sampul dengan ilustrasi yang menunjukkan presiden Joko Widodo dengan di bagian belakang ada bayangan menyerupai tokoh kartun pinokio dengan hidung panjangnya. Banyak interpretasi datang terhadap sampul tersebut seperti relawan Jokowi Mania yang menilai majalah *Tempo* telah menghina Presiden RI sebagai lambang negara dan melaporkan hal tersebut ke dewan pers (Prabowo, 2019).

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Revolusi Riza mengatakan bahwa apa yang dilakukan majalah *Tempo* merupakan bentuk kritik yang biasa dilakukan dalam produk jurnalistik (Adyatama, 2019). Hanya saja, sampul ini memang dianggap multi-interpretasi. Oleh karena itu, pembaca bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap gambar dalam sampul majalah *Tempo* edisi tersebut. Kritik yang digunakan oleh majalah *Tempo* ini dikenal sebagai gaya satire.

Sebelumnya, majalah *Tempo* juga pernah mengalami kasus yang sama pada penggunaan ilustrasi satire dalam *sampul story*-nya. Saat itu, majalah *Tempo* edisi 10 Februari 2008 menggunakan sampul dengan gambar Soeharto dan anak-anaknya. Sampul tersebut menuai protes dari perwakilan umat katolik karena mirip dengan lukisan *The Last Supper* milik Leonardo Da Vinci yang melukiskan Yesus melakukan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya (Buntut Cover Soeharto, *Tempo Minta Maaf*, 2008).

Bagi *Tempo*, kontroversial dalam penggunaan sampul bukanlah hal yang baru. Media ini menggunakan format ilustrasi pada sampul depannya untuk mengkritik pemerintah. Pada sampul depan tersebut, *Tempo* menggunakan

format “menyerang” dengan sindiran, sebuah sarkasme dari karya (Haendy, 2019). Hal ini menjadi cara majalah *Tempo* untuk menjadi media yang independen.

Kejadian yang dialami oleh majalah *Tempo* bukanlah satu-satunya. Kasus terbaru terjadi pada surat kabar di Denmark, *Jyllands-Posten*. Surat kabar ini mengeluarkan grafik yang mengganti logo lima bintang yang terdapat di bendera China menjadi lima ilustrasi partikel virus corona. Hal ini memicu kemarahan pemerintah China dan menuntut surat kabar tersebut meminta maaf seperti disampaikan oleh kedutaan besar China di Denmark (Dea, 2020). Tuntutan tersebut ditolak oleh pemimpin redaksi *Jyllands-Posten* karena merasa tidak bersalah dan tidak bermaksud untuk mengolok-olok situasi di China (Riza, 2020).

Selain itu, majalah asal Perancis *Charlie Hebdo* juga pernah mendapat penyerangan pada awal tahun 2015 karena disebabkan oleh konten satire. Serangan tersebut terjadi ketika majalah ini menerbitkan sebuah karikatur yang dianggap sebagai penistaan terhadap Nabi Muhammad. Hal ini menunjukkan bahwa gaya satire yang digunakan oleh majalah ini memiliki tanggapan yang beragam mulai dari berkepala dingin hingga yang melakukan aksi kekerasan seperti penyerangan kantor redaksi majalah *Charlie Hebdo* sehingga menewaskan 12 orang (Farah, 2019).

Saat ini, sering kali konten satire diterima secara salah oleh pengguna media sosial yang menyebarkannya seperti berita biasa (Posetti, et al., 2019, p. 18). Hal ini biasanya dirancang untuk mendapat keuntungan dari iklan di internet. Hanya saja, kredibilitas berita memang dianggap ikut terpengaruh dengan adanya gaya satire ini. Oleh karena itu, peran literasi media di sini sangat dibutuhkan khalayak agar mampu menangkap secara kritis dalam memahami konten-konten yang berkembang di media berita ataupun lainnya seiring dengan berkembangnya “berita palsu”. Selain itu, jurnalis juga mampu

bertanggung jawab sejak awal bahwa konten berita yang dibuat memang akurat sesuai dengan fakta.

Saat ini, tren “berita palsu” mulai berkembang di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) mencatat sepanjang Agustus 2018 – April 2019 adanya 1.731 informasi yang terindikasi “berita palsu” atau sering disebut hoaks (Maharani, 2019). Dari data tersebut, hoaks paling banyak beredar di bulan April 2019 dengan total jumlah 486 hoaks dan 209 diantaranya tergolong kategori politik (Maharani, 2019). Sepanjang periode tersebut, Indonesia memang sedang menjalani proses menjelang pesta demokrasi yang puncaknya ada di bulan April 2019. Oleh karena itu, adanya hoaks yang berkembang karena seiring dengan kegiatan politik di Indonesia.

Selain data jumlah hoaks yang ditemukan, Kementerian Kominfo juga merilis data bahwa 800.000 situs terindikasi menjadi penyebar hoaks (Purwadi, 2019). 800.000 situs hanya bagian dari beberapa situs yang sampai saat ini belum terindikasi. Dengan adanya situs penyebar hoaks ini, muncul keresahan yang bisa menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap segala informasi yang beredar. Beberapa oknum memanfaatkan situs tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Hoaks dinilai sangat rentan untuk dipolitisasi dan dimanfaatkan sebagai senjata untuk menyerang industri berita, sebagai cara untuk melemahkan liputan yang tidak disukai oleh penguasa (Posetti, et al., 2019, p. 50). Satire menjadi salah satu bagian yang diindikasikan sebagai pemicu hoaks karena adanya disinformasi. Hal ini dikarenakan selain sebagai bagian dari seni, satire dinilai bisa menimbulkan kebingungan pada khalayak ketika menjadi bagian dari sebuah informasi. Adanya satire dalam sebuah informasi menyebabkan multi interpretasi sehingga bisa menghasilkan sebuah disinformasi.

Walaupun disinyalir kehadiran satire memunculkan disinformasi yang bisa berujung munculnya hoaks, satire bisa menjadi bentuk informasi alternatif untuk khalayak. Dikatakan sebagai media alternatif dikarenakan praktik

konglomerasi media telah terjadi di Indonesia sehingga konten yang dibawakan pun tak jauh dari kepentingan elitnya. Media-media satire memberikan ruang bagi publik untuk keluar dari kejenuhan konglomerasi media (Utomo, 2015, p. 195).

Di Indonesia sendiri, satire mulai berkembang di era reformasi yang ditandai oleh turunnya presiden Soeharto dari kursi presiden (Utomo, 2015, p. 196). Sejak saat itu, media bergaya satire mulai bermunculan. Gaya satire sering kali digunakan untuk isu-isu sensitif yang sedang terjadi. Sebelumnya, media dengan gaya satire memang sulit ditemukan karena belum ada undang-undang yang mengatur kebebasan pers. Di era reformasi, undang-undang yang mengatur kebebasan pers dibuat dalam UU Pers no. 40 tahun 1999. Euforia kebebasan yang dimiliki membuat media tidak lagi takut memberitakan berbagai isu yang sebelumnya sensitif untuk diangkat.

Pesan satire pada umumnya menggunakan humor karena mampu melampaui batas-batas sosial politik dan menyediakan ruang terbuka untuk mengkritik otoritas, baik kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan kultural (Utomo, 2015, p. 195). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan satire digunakan sebagai alat kritik kepada pemangku kekuasaan. Salah satu media satir, Mojok.co memakai pesan satire untuk merespons isu yang berhubungan dengan kebijakan publik, mulai dari isu politik, ekonomi dan publik.

Dalam praktiknya, pesan satire untuk isu politik sering dimunculkan dalam bentuk gambar. Bukan tanpa alasan, gambar adalah alat yang bisa digunakan tidak hanya untuk melakukan politik di dalam membangun ruang politik melainkan bisa untuk menciptakan ruang alternatif dan dimensi alternatif dari politik. Hal ini juga berkaitan dengan citra politik yang berkaitan dengan kompetisi, penggunaan gambar bisa memunculkan berbagai makna yang lebih mudah dikaitkan dengan gagasan tentang kekuatan dalam berbagai fenomena sosial dan jangkauan rasionalitas manusia (Stocchetti & Kukkonen, 2011, p. 33).

Kekuatan gambar pada prinsipnya dapat diakses siapa pun yang bisa menangkap rahasianya. Untuk menangkap rahasia tersebut, analisis pada gambar bisa dilakukan. Analisis pada kekuatan gambar tersebut bisa menjadi petualangan intelektual yang menarik melihat penafsiran gambar dan meninggalkan sejenak aktor yang menggunakan kekuatan dalam gambar tersebut (Stocchetti & Kukkonen, 2011, p. 29).

Kekuatan gambar tidak selalu muncul pada gambar. Kekuatannya bisa tampak dalam penggunaan gambar untuk memperkenalkan kondisi sosial yang sedang terjadi. Hal tersebut memungkinkan penggunaan gambar merupakan tujuan dari pengguna gambar untuk mengejar kepentingannya dengan meminta bentuk-bentuk respons tertentu dari khalayak (Stocchetti & Kukkonen, 2011, p. 31).

Gambar 1.1 *Sampul* koran *Tempo* edisi 19 September 2019



Sumber: Koran *Tempo*

Gambar 1.2 *Sampul* koran *Tempo* edisi 30 September 2019



Sumber: Koran *Tempo*

Untuk penelitian ini, peneliti memilih koran *Tempo* sebagai objek penelitian. Hal ini dikarenakan koran *Tempo* tercatat dalam dewan pers. Selain itu, koran *Tempo* merupakan salah satu media cetak yang kerap kali menggunakan ilustrasi satire dalam memberitakan salah satu isu publik.

Selama periode September 2019 koran *Tempo* membahas KPK mulai dari pemilihan pimpinan KPK hingga RUU KPK yang menuai banyak protes. Dalam pembahasan topik revisi undang-undang KPK, koran *Tempo* menggunakan gambar satire dalam sampul untuk beberapa edisi. Ilustrasi satire yang diteliti pada penelitian ini ialah edisi 19 September 2019 dan 30 September 2019 yang ditunjukkan pada gambar 1.1 dan gambar 1.2.

Dengan menggunakan metode studi resepsi pada ilustrasi satire yang terdapat dalam koran *Tempo* edisi revisi undang-undang KPK, peneliti ingin membahas bagaimana pemaknaan yang diterima oleh khalayak terhadap penggunaan ilustrasi tersebut.

Studi resepsi merupakan pendekatan kualitatif untuk memaknai pesan dari sebuah media. Titik awal penelitian ini adalah asumsi bahwa makna yang terdapat dalam media massa tidak hanya berbasis pada teks (Toni & Fajariko, 2017, p. 155). Fokus pada penggunaan studi resepsi ini digunakan untuk melihat makna yang diterima oleh khalayak yang berbeda. Makna yang didapat pun bisa berbeda dari tiap khalayak berdasarkan sudut pandangnya masing-masing.

Pada awalnya, studi resepsi ini memang ditujukan untuk penelitian dalam televisi. Hal ini dikarenakan siaran televisi yang memiliki bentuk diskursus beraura-visual. Meskipun demikian, pendekatan studi ini tidak memfokuskan pada media televisi namun berfokus pada penggunaan diskursus visual walaupun proses distribusi khalayaknya berbeda. (Hall, 2011, p. 214). Oleh karena itu, metode ini bisa digunakan pada media selain televisi.

Penelitian ini menggunakan studi resepsi dikarenakan bertujuan untuk melihat bagaimana khalayak menerima makna yang ditampilkan dari ilustrasi satire milik koran *Tempo*. Adanya kesamaan dari objek yang berbentuk visual menjadi alasan studi resepsi digunakan. Bagaimana proses penerimaan makna oleh khalayak dari makna yang dibentuk oleh redaksi koran *Tempo* diteliti menggunakan studi resepsi encoding/dekoding milik Stuart Hall.

Dalam penelitian ini, khalayak akan dipersempit menjadi mahasiswa. Hal ini dikarenakan mahasiswa termasuk anak muda yang dinilai perlu mendapatkan literasi politik untuk menghadapi hoaks yang bisa muncul dari disinformasi sebuah ilustrasi satire. Pakar komunikasi politik Gun Gun Heryanto dalam diskusi bertajuk Literasi Politik mengatakan bahwa literasi politik perlu dibangun untuk kalangan anak muda agar mampu menahan derasnya informasi hoaks sehingga bisa mengembangkan demokrasi Indonesia ke depan. Literasi politik terhadap anak muda dirasa penting juga karena di masa yang akan datang kaum mudalah yang terjun ke panggung politik. (Winata, 2019)

Selain itu, mahasiswa juga pernah melakukan aksi besar-besaran pada 23-24 September 2019. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk membatalkan revisi undang-undang KPK (Movanita, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa secara tidak langsung turut berpartisipasi dalam dunia politik. Partisipasi anak muda dalam dunia politik juga merupakan peran media yang mampu meningkatkan pengetahuan faktual anak muda mengenai dinamika politik bangsanya (NK, Rikang, & Dimas, 2012, p. 68).

Pemilihan mahasiswa yang diteliti pun dibatasi hanya pada mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara (UMN). Hal ini dikarenakan mahasiswa UMN juga mengikuti aksi demo yang diselenggarakan pada 24 September 2019. Hanya saja, mereka mengikuti aksi tersebut tanpa menggunakan almamater kampus dikarenakan beredar Surat Edaran Rektor no. 304/Rektor/IX/2019 meminta tidak melibatkan nama kampus dalam bentuk apapun di aksi tersebut. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Ika Yanuarti mengatakan bahwa akan ada sanksi bagi pelanggar surat edaran tersebut meskipun bentuk sanksinya belum dirumuskan (Raditya & Annisa, 2019, p. 41).

Surat edaran tersebut dinilai bertentangan dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang tertera dalam UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam UU tersebut dituliskan bahwa menjamin kebebasan akademis dalam melaksanakan Tridharman Perguruan Tinggi yang salah satunya meliputi pengabdian kepada masyarakat. Aksi demonstrasi pada 24 September 2019 dinilai menjadi salah satu upaya mahasiswa untuk mencapai apa yang tertulis pada undang-undang (Raditya & Annisa, 2019, p. 45).

Di luar aksi demonstrasi tersebut, internal mahasiswa UMN juga sempat ada pro dan kontra dalam isu aksi mahasiswa tersebut. Melalui unggahan dalam media sosial resmi, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMN mengeluarkan rilis pada 18 September 2019 yang menyatakan sikap bahwa mereka tidak

memiliki fokus agenda yang mengarah pada politik. BEM UMN mengatakan bahwa mereka hanya fokus pada pembinaan internal mahasiswa UMN.

Melihat situasi tersebut, mahasiswa UMN dinilai menarik untuk menjadi objek pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan tingkat literasi politik yang beragam dari mahasiswa UMN. Ada mahasiswa yang tetap mengikuti aksi demonstrasi meskipun dihimbau tidak ikut dan ada pula mahasiswa yang mengikuti saran kampus sehingga tidak terlalu mengikuti isu politik yang beredar.

Penelitian ini akan melihat bagaimana peran media mampu meningkatkan literasi politik anak muda melalui ilustrasi satire politik yang dirasa belum ada riset yang membahasnya. Selain itu, penelitian ini juga melihat apakah ada efek dari tingkat literasi politik terhadap posisi resepsi mahasiswa dalam memaknai ilustrasi satire koran *Tempo*.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis telah merumuskan sebuah pertanyaan utama yang akan menjadi acuan dalam pembuatan penelitian ini. Rumusan tersebut adalah “Bagaimana Resepsi Mahasiswa Terhadap *Cover Story* Koran *Tempo* Edisi Revisi Undang-Undang KPK?”

1.3. Pertanyaan Penelitian

Untuk mendapat jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat, ada beberapa daftar pertanyaan yang mempermudah penelitian ini berjalan. Daftar pertanyaan tersebut, antara lain:

- a. Bagaimana berita revisi undang-undang KPK digambarkan dalam bentuk ilustrasi satire pada *cover story* koran *Tempo* edisi revisi undang-undang KPK dan resepsi khalayak terhadap pemberitaan tersebut?

- b. Bagaimana posisi resepsi khalayak mahasiswa terhadap ilustrasi satire dalam *cover story* koran *Tempo* edisi revisi undang-undang KPK?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang dicapai dalam penyelesaiannya. Berikut daftar tujuan dari penelitian ini diadakan:

- a. Mengetahui penggambaran berita revisi undang-undang KPK dalam bentuk ilustrasi satire pada *cover story* koran *Tempo* edisi revisi undang-undang KPK dan resepsi khalayak terhadap pemberitaan tersebut.
- b. Mengetahui posisi resepsi khalayak mahasiswa terhadap ilustrasi satire dalam *cover story* koran *Tempo* edisi revisi undang-undang KPK.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Kegunaan Akademis

Dalam penelitian ini, kegunaan akademis menyangkut konsep gaya satire dalam media. Di Indonesia, gaya satire dinilai masih jarang digunakan dan sering kali menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini bisa menguji praktik penggunaan konsep gaya satire dalam media di Indonesia.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini ialah mengenalkan adanya gaya satire dalam media terutama di dunia jurnalistik. Gaya satire ini merupakan alternatif model pemberitaan bagi perusahaan media. Selain itu, khalayak menjadi memiliki pilihan dalam mengonsumsi informasi yang ada khususnya di Indonesia.

1.5.3. Kegunaan Sosial

Penelitian ini sekaligus bisa menjadi bahan literasi mengenai media di masyarakat. Hal ini dikarenakan di lingkungan masyarakat sendiri terkadang didapati perkembangan disinformasi akibat kurangnya literasi media yang mencukupi.

1.6. Keterbatasan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, tentu ada beberapa keterbatasan yang dimiliki. Pertama, keterbatasan media yang diteliti hanya satu yaitu koran *Tempo*. Sebenarnya ada beberapa media lainnya yang sering kali memakai ilustrasi satire. Hanya saja, koran *Tempo* menjadi media yang cukup sering memakai satire dan sering kali kontroversial. Di media lain, penggunaan gaya satire hanya muncul beberapa kali dalam beberapa kasus saja.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki keterbatasan hanya berfokus pada penggunaan satire dalam bentuk ilustrasi. Sejatinya penggunaan satire bisa dalam berbentuk artikel. Hanya saja, peneliti membatasi penelitian ini hanya pada ilustrasi satire saja.

Keterbatasan selanjutnya adalah penelitian ini hanya mengambil dari sisi resepsi khalayak saja. Oleh karena itu, penulis hanya melihat bagaimana praktik dari penggunaan satire ini bisa dimaknai oleh khalayak terutama mahasiswa dalam penelitian ini. Penulis tidak meneliti lebih dalam mengenai dapur redaksi yang menentukan penggunaan satire dalam sebuah media, untuk hal ini koran *Tempo*.

Keterbatasan terakhir ialah pemilihan khalayak dalam penelitian ini yang hanya terbatas pada mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Hal ini bisa memberi pengaruh pada keterbatasan hasil penelitian ini karena tingkat literasi politik mahasiswa tiap universitas bisa berbeda-beda.